

## STRATEGI IRAN DALAM MERESPONS SANKSI AMERIKA SERIKAT PERIODE 2018–2020

Adre Alir<sup>1</sup>, Muhamad Adian Firas<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>1</sup>adrealirrh@gmail.com, <sup>2</sup>adian.firas@uinjkt.ac.id

### Abstract

*This research analyzes Iran's strategies in dealing with disruptions in the oil sector due to United States (US) sanctions during the 2018–2020 period, coinciding with the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Iran initiated its nuclear program in 1957 under Atoms for Peace but suspended it in 1979 under Ayatollah Khomeini. In 2013, Iran engaged in negotiations with the P5+1, leading to the JCPOA three years later. However, in 2018, Trump withdrew the US from the JCPOA, imposing economic sanctions on Iran through five Executive Orders (EO) during 2018-2020, causing disruptions in the oil sector and negatively impacting the country's economy. Iran responded by strengthening bilateral ties and employing innovative approaches. The research, using qualitative and descriptive methods with secondary data sources, such as literature from books, documents, journals, newspapers, magazines, and online articles. The conceptual framework involves international economic sanctions and economic security, revealing that the US sanctions achieved constraining and signaling objectives but failed to coerce Iran. Despite economic challenges, Iran maintained its nuclear program, achieving constraining and signaling goals, while diversifying exports and adopting innovative strategies to counter the sanctions.*

**Keywords:** JCPOA, Iran, US, Economic Sanctions, Economic Security, Nuclear

### PENDAHULUAN

Iran telah memulai program nuklir sejak di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlavi pada tahun 1957. Namun, program nuklir dihentikan ketika Iran dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Pada akhir tahun 1980-an, Iran kembali mengaktifkan program nuklirnya (Davenport, 2023). Terdapat dinamika yang terjadi dalam perkembangan program nuklir Iran, hingga akhirnya pada tahun 2015 Iran menandatangani perjanjian nuklir bernama JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) setelah sebelumnya Presiden Barack Obama mengajak Iran bernegosiasi terkait program nuklir. Adapun aktor yang tergabung dalam JCPOA adalah Uni Eropa dan negara-negara P5+1, yaitu Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Rusia, Prancis, Inggris, dan Jerman (Council on Foreign Relations, 2023).

Perjanjian nuklir tersebut mengatur Iran untuk mengurangi uranium dan tidak melakukan pembangunan fasilitas uranium melebihi 3,67% (European External Action Service 2015). Terbentuknya JCPOA ini memiliki dampak positif bagi sebagian negara di dunia dan Iran. Dewan Keamanan (DK) menyatakan bahwa pelaksanaan JCPOA menandai perubahan besar dalam pertimbangannya tentang masalah nuklir Iran, dan menyatakan bahwa mereka ingin membangun hubungan baru dengan Iran yang diperkuat dengan pelaksanaannya, serta berharap untuk mencapai kesimpulan yang memuaskan tentang masalah ini. DK lebih lanjut menegaskan bahwa pelaksanaan penuh JCPOA akan meningkatkan kepercayaan terhadap program nuklir damai Iran dan menekankan bahwa hal itu baik untuk mendorong serta memfasilitasi pengembangan kontak ekonomi, perdagangan, dan kerja sama dengan Iran (United Nations, 2018).

Namun, tiga tahun setelah perjanjian dilaksanakan, tepatnya pada 8 Mei 2018, Presiden Donald Trump menarik AS dari JCPOA. AS pun memberlakukan sanksi embargo bagi Iran. Ini bukanlah pertama kalinya AS memberi sanksi ekonomi bagi Iran, tetapi kali ini AS memberi sanksi sekaligus menyatakan keluar dari JCPOA secara resmi. Salah satu dari sanksi ekonomi AS adalah kebijakan *Significant Reduction Exceptions* (SRE) yang tidak hanya melibatkan Iran, tetapi juga India, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Turki, Yunani, Taiwan, dan Italia sebagai negara-negara pengimpor minyak Iran. Sanksi ini bertujuan untuk menekan ekspor minyak Iran—yang merupakan sumber utama pendapatan Iran—ke nol atau *export to zero*. AS melarang negara-negara tersebut membeli minyak dari Iran, dan jika mereka tetap membeli minyak Iran maka AS akan memberlakukan sanksi terhadap mereka (Belal, 2019:27).

AS memberikan sanksi yang menghambat sektor minyak Iran karena Iran termasuk ke dalam negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Selain itu, Iran adalah produsen minyak mentah terbesar ketiga di dunia. Namun, perkembangan sektor energi telah terhambat oleh sanksi internasional. Bergantung pada penjualan minyak mentah, Iran menyumbang sekitar 65% pendapatan publiknya, dan jika Teheran

menerima sanksi atau bahkan tindakan pencegahan untuk mencegah minyak mentah keluar dari pasar, hal itu akan berdampak negatif pada ekonomi negara (Folkesson, 2012).

Sanksi ekonomi, yang biasanya dikombinasikan dengan tindakan lain seperti pemutusan atau pembatasan hubungan diplomatik dan budaya, digunakan untuk tujuan politik. Sanksi ekonomi memiliki tujuan yang berkaitan dengan perilaku, reputasi negara, dan struktur internasional (Barber, 1979). Berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sanksi ekonomi mempunyai dampak bagi negara yang dikenakan sanksi, terutama dalam sektor ekonomi. Adapun aspek ekonomi yang terganggu akibat dari sanksi ini secara spesifik adalah sektor minyak Iran.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif Creswell dan Creswell (2017) dengan metode deskriptif. Penelitian ini diselesaikan menggunakan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan datanya melalui kajian pustaka dari data-data yang telah dikumpulkan. Sedangkan, dalam teknik analisis data, penulis mengumpulkan terlebih dahulu, kemudian menyeleksi data sesuai kebutuhan yang relevan dengan topik dan menyajikannya secara sistematis. Tahap terakhir adalah dengan menarik kesimpulan.

Sanksi ekonomi yang diberikan AS kepada Iran menimbulkan akibat buruk bagi Iran, terutama dalam perekonomian Iran. Hal ini karena penggunaan sanksi internasional memiliki salah satu fungsi yang disebut sanksi *constraining*, yaitu dimaksudkan untuk membatasi dan mempersulit kehidupan individu atau entitas kemampuan target untuk bertindak. Sanksi pembatasan mencakup serangkaian tindakan yang membatasi akses mereka ke sumber daya penting, seperti dana, uang, persenjataan, dan barang (Idris and Mu'tashim, 2023).

Sanksi ekonomi dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Namun, keberhasilan sanksi bergantung pada berbagai faktor. Meskipun terdapat keterbatasan, sanksi masih menjadi alat yang berguna dalam membentuk perilaku negara yang dituju (Drezner, 2011:104). Namun, efektivitas sanksi yang dibahas oleh para ilmuwan telah

menimbulkan adanya dua sudut pandang yang berbeda: mereka yang "optimis" dan mereka yang "pesimis" (Idris and Mu'tashim, 2023:19).

Sanksi memiliki beberapa tujuan atau fungsi, yaitu *coercing* (mengubah perilaku), *constraining* (membatasi perilaku), dan *signalling* (mengirim pesan/menggarisbawahi pentingnya suatu norma). *Coercing* adalah upaya memaksa target untuk menerapkan kebijakan yang diinginkan oleh pengirim sanksi. *Constraining* ialah di mana ketika target tidak bersedia melakukan apa yang diminta oleh pengirim, sanksi diberikan dengan tujuan untuk mempersulit hidup target. Sedangkan, *signalling* ialah tindakan politik internasional yang harus diambil untuk menanggapi pelanggaran norma, dan sanksi adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan ini (Giumelli and Ivan, 2013:9).

Adapun kemampuan suatu negara untuk menjaga perekonomian yang layak dan melindungi kepentingan ekonominya dari ancaman eksternal disebut keamanan ekonomi atau *economic security*. Menurut Ken Booth dan Steve Smith, keamanan ekonomi sangat penting bagi suatu negara karena memungkinkan mereka mencapai tujuan lain, seperti keamanan nasional, kemandirian politik, dan kesejahteraan sosial (Booth and Smith, 1995:209–12). Kemampuan suatu negara untuk menjaga perekonomian yang layak dan melindungi kepentingan ekonominya dari ancaman eksternal disebut keamanan ekonomi atau *economic security*. Kedua konsep ini memiliki keterkaitan, di mana ketika sanksi ekonomi diterapkan maka hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya keamanan ekonomi negara target.

## **PEMBAHASAN**

Saat kondisi ekonomi suatu negara lebih berkembang dan terdiversifikasi, mereka seharusnya lebih siap untuk menolak sanksi. Namun, jika sanksi menghambat pembangunan atau pertumbuhan maka negara tersebut akan menjadi kurang mampu untuk berdiri teguh dalam menghadapi ancaman ekonomi (Allen, 2005:129). Hal ini terjadi kepada Iran, di mana Iran kurang mampu untuk menghadapi ancaman ekonomi akibat sanksi sehingga menyebabkan kondisi perkembangan ekonomi yang terhambat. Adapun aspek ekonomi di sini adalah mencakup angka FDI, PDB,

ekspor minyak, dan inflasi. Keempat aspek tersebut berkaitan erat dengan sektor minyak Iran. Di mana kemampuan Iran untuk menghasilkan uang dan mengakses mata uang internasional sangat bergantung pada minyak (Rome, 2022).

### **Kondisi Ekonomi Iran Sebelum dan Saat Berlangsungnya Sanksi**

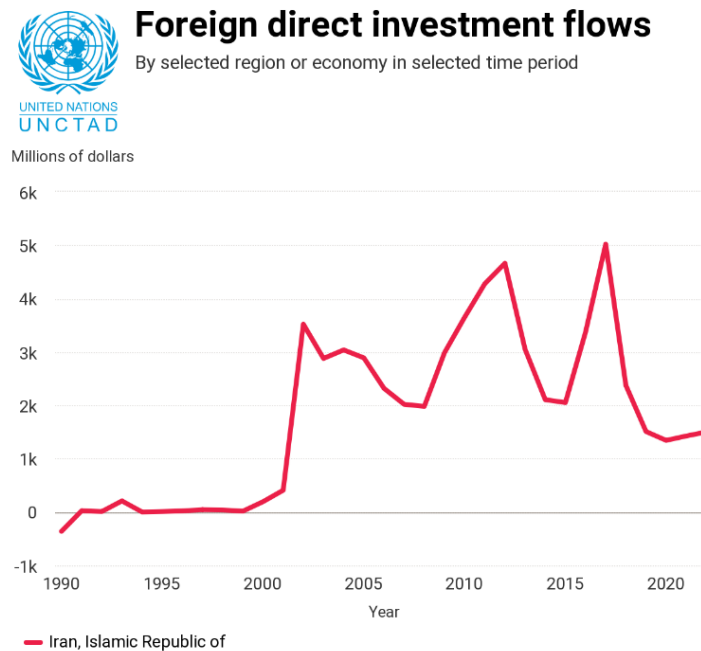
Sebuah hasil penelitian yang dilakukan Mirkina (2018) menunjukkan bahwa adanya dampak sanksi terhadap FDI tergantung pada biaya sanksi, sanksi awal, dan kerugiannya selama satu dekade. Penurunan FDI terjadi secara signifikan sebagai akibat dari sanksi. Namun, selama sebagian besar masa sanksi, FDI mengalami kerugian dalam jangka pendek, tetapi kerugian tersebut sedikit menurun dalam jangka panjang (Heydarian, Pahlavani, and Mirjalili, 2022:73).

Dalam kasus yang dialami Iran, sejak ditetapkannya EO 13846 pada 7 Agustus 2018, setidaknya sebanyak total 217 individu, entitas, dan kapal telah ditunjuk sebagai SDN; sebanyak 46 entitas ditunjuk sebagai daftar SDN berdasarkan EO 13871 tanggal 8 Mei 2019; sebanyak 112 individu dan entitas ditetapkan sebagai daftar SDN berdasarkan EO 13876 sejak 24 Juni 2019; serta sebanyak 17 bank masuk ke dalam daftar SDN berdasarkan EO 13902 (Office of Foreign Assets Control, 2023). Hal ini berpengaruh terhadap penurunan FDI Iran yang menjadi dampak jangka pendek dari sanksi. EO 13846, EO 13871, EO 13902, dan EO 13949 secara langsung menghasilkan implikasi terhadap entitas dan individu. Banyak perusahaan asing terkena sanksi dan berhenti bekerja sama dengan Iran.

FDI (*Foreign Direct Investment*) atau investasi asing di Iran pada 2015–2017 menunjukkan angka yang terus bertumbuh. Menurut data yang diterbitkan dalam *World Investment Report* 2018, diperkirakan aliran masuk FDI dari Iran sebesar \$5,01 miliar pada tahun 2017. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 48,8% dari tahun 2016 yang hanya mencapai \$3,37 miliar. Sedangkan, pada tahun 2015, Iran mencatat aliran masuk investasi asing sebesar \$2,10 miliar (Eghtesad Online, 2018; Macrotrends, 2023a).

Namun, FDI Iran pada tahun 2018 hanya mencapai \$2,37 miliar, yang mana mengalami penurunan 52,72% dari tahun sebelumnya (Macrotrends, 2023a). Sanksi internasional dan ketidakstabilan ekonomi adalah penyebab penurunan FDI ini, meskipun Iran berupaya untuk menarik lebih banyak FDI—terutama di sektor energi—tetapi tetap saja sanksi AS secara signifikan telah membatasi Iran untuk mendapatkan FDI (Rasanah International Institute for Iranian Studies, 2023). Pada tahun 2019, FDI Iran adalah \$1,51 miliar, turun 36,45% dari tahun sebelumnya. Dan kembali turun pada 2020, di mana FDI Iran hanya \$1,34 miliar. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 11,01% dari tahun 2019 (UNCTAD, 2021:250).

**Gambar 1.** Grafik FDI Iran Tahun 1990–2020



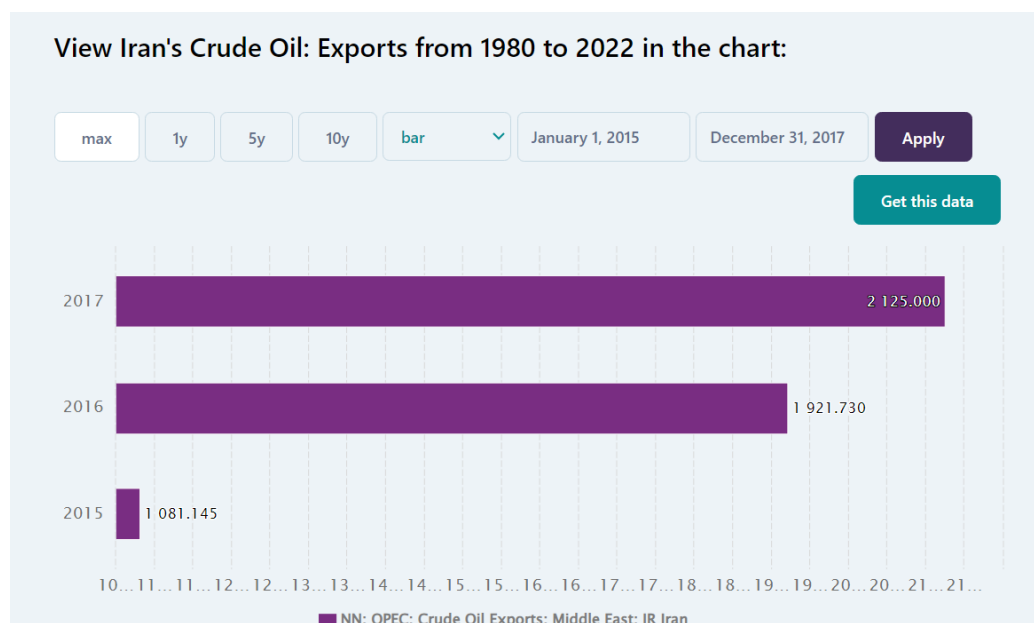
Sumber: UNCTAD, *World Investment Report 2023*, 2023

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Laudati dan Pesaran (2022) yang mengidentifikasi efek sanksi terhadap ekonomi Iran periode 1989–2019. Perkiraan dari SVAR (*Structural Vector Autoregression*) yang ditambahkan dengan sanksi menunjukkan bahwa sanksi akan secara signifikan menurunkan pendapatan ekspor minyak Iran dan mengakibatkan depresiasi

drastis pada rial Iran, yang kemudian akan menyebabkan peningkatan inflasi dan penurunan pertumbuhan *output* (Laudati and Pesaran, 2022).

Iran mengalami peningkatan ekspor minyak antara tahun 2015–2017. Jumlah minyak yang diekspor pada tahun 2015 adalah lebih dari 1 juta bph (barel per hari) (Glenn, 2015). Angka tersebut terus meningkat pada tahun 2016 dan 2017 berdasarkan laporan dari website CEIC Data (2023) dan US Energy Information Administration (2021).

**Gambar 2.**Diagram Ekspor Minyak Mentah Iran 2015–2017



Sumber: CEIC Data, *Iran Crude Oil: Exports*, 2023

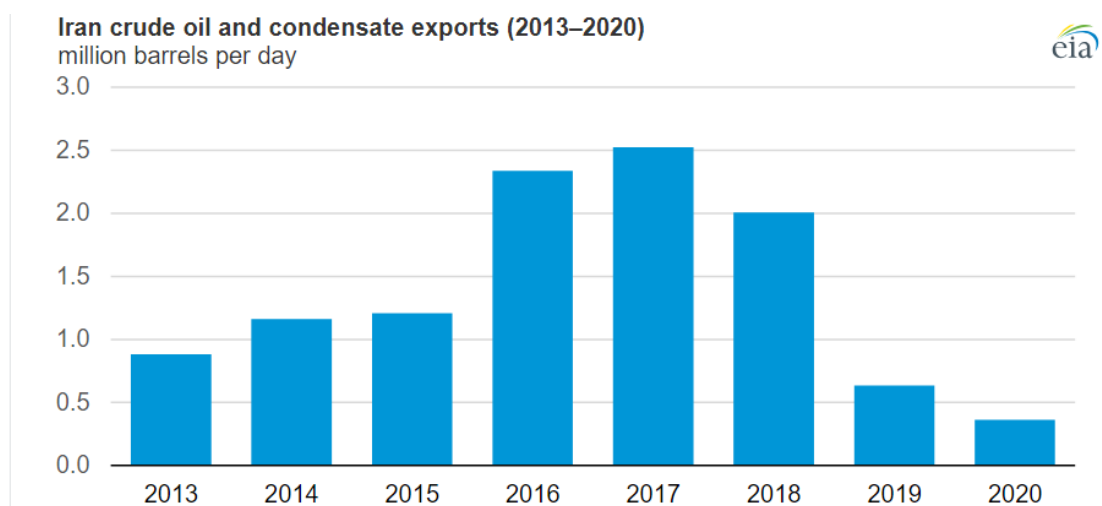
Pada tahun 2018, sektor minyak Iran mengalami penurunan baik pada produksi maupun ekspor. Sebelum AS keluar dari JCPOA pada April 2018, ekspor minyak Iran mencapai 2,9 juta bph. Namun, pada bulan Oktober 2018, ekspor menyusut menjadi 1,8 juta bph sebagai akibat dari upaya pembeli untuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak Iran (Ghasseminejad, 2023), terutama saat pemerintahan Trump mengakhiri kebijakan SRE-nya terhadap Iran (The White House, 2019).

Kebijakan SRE merupakan kebijakan yang melibatkan delapan negara—Tiongkok, India, Italia, Yunani, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan

Turki—agar tidak terkena sanksi AS dalam mengimpor minyak dari Iran. Maka dengan diberhentikannya kebijakan SRE ini, delapan negara tersebut akan terkena sanksi apabila masih mengimpor minyak dari Iran (Gilroy and Leferve, 2019). Tujuannya adalah untuk menjadikan ekspor minyak Iran menjadi nol atau *export to zero* dan menghapus sumber pendapatan utama pemerintahan.

Kemudian, pada tahun 2019 ekspor minyak Iran turun dari 2,07 juta bph menjadi 0,97 juta bph (Jungman and Jerry, 2022). Dan pada tahun 2020, ekspor minyak Iran kurang dari 400.000 bph—termasuk ekspor minyak mentah dan kondensat (US Energy Information Administration, 2021).

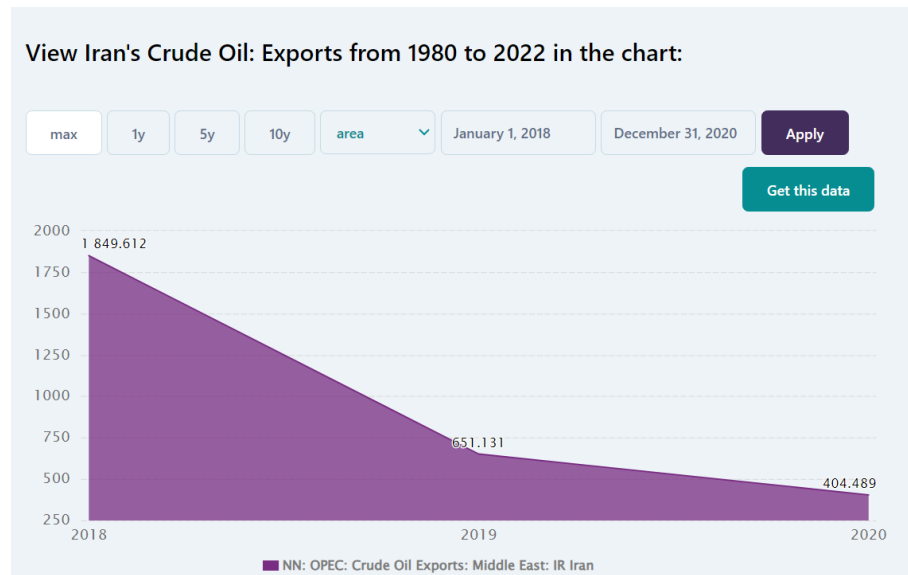
**Gambar 3.**Diagram Ekspor Minyak Mentah dan Kondensat Iran Tahun 2013–2020



Sumber: US Energy Information Administration, *Iran's Crude Oil Production Fell to an Almost 40-Year Low in 2020*, 2021



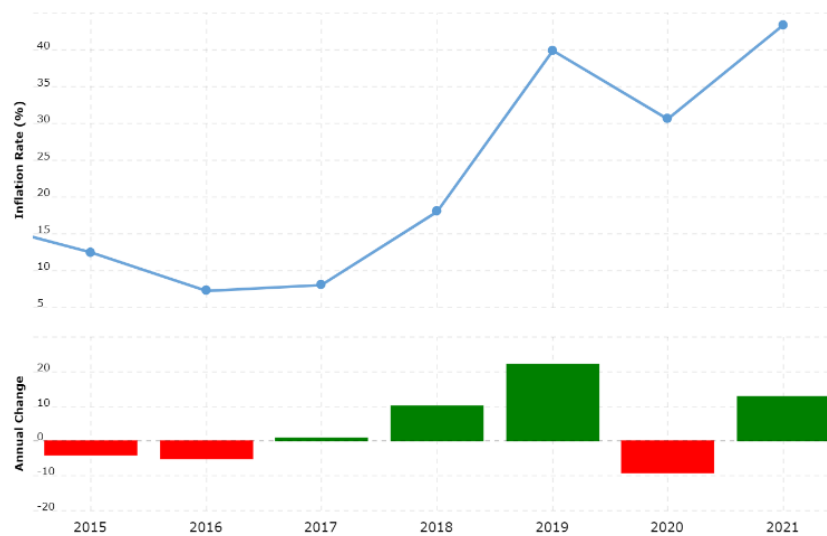
**Gambar 4.** Grafik Ekspor Minyak Mentah Iran 2018–2020



Sumber: CEIC Data, *Iran Crude Oil: Exports*, 2023

Adapun inflasi di Iran terjadi peningkatan yang signifikan. Inflasi meningkat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena sanksi yang disebabkan oleh ekspor minyak (Ture and Khazaei, 2022). Inflasi yang terjadi di Iran pada tahun 2015 dan 2016 adalah 11,9% dan 9,1% secara berturut-turut, meskipun pada tahun 2017 sedikit naik menjadi 9,6% (International Monetary Fund, 2023; O'Neill, 2023). Pada tahun 2018, inflasi berada di angka 18,01%, yang berarti meningkat 9,97% dari tahun sebelumnya; dan pada tahun 2019 sebesar 39,91%, meningkat 21,89% dari tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2020 inflasi Iran menurun sebesar 9,31% dari tahun 2019 yaitu menjadi 30,59%, tetapi angka inflasi tersebut masih cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya (Macrotrends, 2023d; World Bank, 2023).

**Gambar 5.** Persentase Inflasi Iran Tahun 2015–2020



Sumber: Macrotrends, *Iran Inflation Rate 1960-2023, 2023d*

Namun, tidak hanya akibat dari menurunnya ekspor minyak. Inflasi yang terjadi juga diakibatkan karena adanya larangan pembelian dolar AS yang dikeluarkan melalui EO 13846. Hal ini membuat mata uang rial Iran telah kehilangan setengah nilainya karena pembelian dolar secara panik oleh masyarakat Iran yang khawatir (Iran International, 2023; Lipin, 2018). Hal ini membuat impor jauh lebih mahal dan menyebabkan inflasi yang sangat tinggi (Iran International, 2023).

Walaupun terjadi peningkatan inflasi pada periode sanksi ini, dapat dilihat bahwa PDB di Iran justru mengalami penurunan, di mana faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah gangguan dari sumber luar terhadap produksi gas dan minyak, seperti sanksi baru yang dikenakan pada industri petrokimia, logam, pertambangan, dan maritim, serta berakhirnya keringanan AS terhadap importir utama minyak Iran (World Bank 2019).

PDB Iran pada tahun 2018 adalah \$327,9 miliar dan pada tahun 2019 \$283,65 miliar (International Monetary Fund, n.d.; Macrotrends, 2023c, 2023b). Kemudian, pada tahun 2020, PDB Iran adalah \$239,74 miliar. Namun, beberapa laporan menyatakan bahwa angka pastinya tidak tepat, dan beberapa sumber memperkirakan nilai yang lebih tinggi (International Monetary Fund, n.d.; Macrotrends, 2023c, 2023b; The Iran Primer, 2021).

**Gambar 6.** Grafik Pertumbuhan PDB Iran Tahun 2017–2020



Sumber: World Bank, *World Bank Open Data*:

*GDP Growth (Annual %) - Iran Islamic Republic*

Dinamika pada tingkat ekonomi makro tersebut mempengaruhi ekonomi mikro Iran. Menurut Djavad Salehi-Isfahani—seorang profesor ekonomi di Virginia Tech yang berfokus pada perekonomian Iran—sanksi menyebabkan meningkatnya pengangguran dan inflasi sehingga membuat perekonomian Iran menjadi sangat buruk (Northam, 2020). Akibat dari keadaan ekonomi yang tidak stabil ini, kekerasan dalam rumah tangga dan bunuh diri meningkat. Selain itu, juga menyebabkan pasar makanan dan bursa mata uang bergejolak (Morris, 2021). Keluhan ekonomi juga menyumbang 72% demonstrasi sejak Januari 2018. Kekhawatiran ketenagakerjaan, seperti upah yang tidak dibayar, penutupan pabrik, ketidakamanan kerja, dan kondisi kerja yang buruk, serta masalah yang terkait dengan devaluasi rial, tingginya tingkat inflasi, dan perusahaan Iran yang menipu investor, adalah motivasi yang signifikan (Jones and Newlee, 2019).

Pada akhir Juni 2018, terjadi protes yang disebut dengan Protes *Bazaar* di Teheran, Isfahan, dan Shiraz. Pemilik toko perkotaan, yang dikenal sebagai *bazaaris*, mengorganisir protes ini dengan menutup toko mereka dan turun ke jalan pada tanggal 24 Juni 2018, hari di mana nilai tukar rial jatuh akibat sanksi yang terjadi (Jones and Newlee, 2019). Kemudian, pada November 2019 juga terjadi protes yang disebut *Bloody Aban*. Protes ini dipicu oleh naiknya harga bensin sebanyak 200% dan adanya sistem penjatahan. Harga bahan bakar menjadi 15.000 rial per liter, atau sekitar 13

sen, dari 10.000 rial, dan dibatasinya kapasitas mobil pribadi menjadi 60 liter per bulan, dan harga tambahan untuk mobil menjadi 30.000 rial per liter (Iran Watch, 2019).

Dampak sanksi yang telah dipaparkan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Iran Hassan Rouhani pada September 2020 bahwa Iran menghadapi akibat dari sanksi AS. Presiden Rouhani menuduh AS melakukan "kebiadaban" karena telah membuat Iran mengalami kerugian sebesar \$150 miliar sebagai akibat dari sanksi yang diberlakukan. Ia juga mengatakan bahwa Iran harus mengirimkan kemarahan mereka kepada Gedung Putih (Reuters, 2020).

Dalam konsep sanksi ekonomi internasional, suatu negara yang memberikan sanksi tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hubungan antara AS dan Iran, AS telah menggunakan berbagai macam sanksi sebagai alat utama kebijakannya terhadap pemerintah Iran sejak Revolusi Islam tahun 1979 (Congressional Research Service, 2023:1). Sanksi ekonomi semakin sering digunakan oleh pemerintah AS untuk melawan ancaman terhadap kepentingan negara (US Government Accountability Office, 2020). Pada era pemerintahan Trump, strategi yang digunakan di Iran adalah menggunakan tekanan ekonomi, politik, dan militer bertujuan untuk mengubah perilaku Iran dan mengancam, atau bahkan menyebabkan, keruntuhan rezim Iran (The Iran Primer, 2018).

Akibat sanksi, ekonomi Iran mengalami perubahan ke arah negatif dengan perbandingan antara kondisi ekonomi Iran sebelum keluarnya AS dari JCPOA dan setelah keluarnya AS dari JCPOA sekaligus diterapkannya sanksi ekonomi oleh AS. Perubahan yang terjadi dapat diartikan sebagai dampak dari sanksi yang diterapkan oleh AS pada periode 2018–2020 melalui lima EO yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Meskipun ekonomi Iran—terutama sektor minyak—mengalami gangguan yang signifikan, ini tidak menunjukkan bukti bahwa tujuan AS untuk mengubah perilaku Iran atau *coercing* tercapai. Hal ini dapat dilihat dari respons yang dilakukan Iran dalam kegiatan pengembangan nuklirnya. Namun, AS hanya mencapai fungsi sanksi dalam *constraining* yang menghambat atau mempersulit

kondisi ekonomi Iran akibat dari sanksi tersebut, serta *signalling* seperti beberapa negara atau perusahaan asing yang berhenti bekerja sama dengan Iran.

### **Strategi Iran dalam Merespons Sanksi AS Periode 2018–2020**

Kemampuan Iran untuk mempertahankan keamanan ekonomi negaranya dapat dilihat dari dinamika kestabilan ekonomi di Iran. Sebelum terkena sanksi dari AS, kondisi PDB, tingkat ekspor-impor, dan nilai FDI Iran cenderung menunjukkan angka yang baik dan inflasi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk mempertahankan keamanan ekonominya. Namun, keamanan ekonominya terancam karena adanya sanksi ekonomi dari AS pada periode 2018–2020. Meskipun keamanan ekonominya terancam karena adanya sanksi ekonomi dari AS, Iran berusaha untuk menjaga keamanan ekonominya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan diversifikasi ekspor, hal ini dilakukan agar Iran dapat mewujudkan kembali kemandirian ekonomi (*economic independence*), ketahanan ekonomi (*economic resilience*), dan kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*).

Dalam merespons sanksi dan dampak yang diterima, Iran melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan, salah satunya meningkatkan hubungan bilateral dengan beberapa negara. Kekecewaan Ayatollah Khomeini terhadap negara-negara Eropa yang tidak membantu Iran membuat Khomeini berusaha mengubah haluan ke arah Timur. Khomeini menyatakan bahwa Iran harus ‘melihat’ ke Timur daripada ke Barat karena Eropa tidak bertindak sehingga Iran terlihat diremehkan karena bergantung kepada Eropa (Farda, 2018).

Untuk menghindari sanksi AS, Teheran menggunakan strategi yang inovatif. Pada Januari 2019, Iran menawarkan diskon kepada pembeli di Asia sebesar \$1 per barel, sekitar 30 sen lebih rendah dari harga minyak mentah ringan Arab Saudi. Ini merupakan diskon terbesar yang ditawarkan Iran terhadap harga Saudi dalam lebih dari sepuluh tahun. Pada Maret 2019, 76% total ekspor minyak Iran ditujukan ke Asia, sebagian besarnya adalah ke Tiongkok, Korea Selatan, India, Turki, dan Jepang (The Iran Primer, 2019).

Iran juga mulai menggunakan beberapa taktik untuk menghindari sanksi. Beberapa kapal tanker mematikan sistem identifikasi yang digunakan oleh Organisasi Maritim Internasional untuk melacak pergerakan kapal, sementara kapal lain mengubah nama dan nomor mereka di laut untuk menghindari dideteksi. Pada pertengahan 2019, Iran juga menyimpan minyaknya di tempat penyimpanan terikat di pelabuhan Jinzhou, Huizhou, dan Tianjin di Tiongkok. Iran dapat mencari pembeli di Asia tanpa membayar tarif atau bea lainnya karena minyak yang disimpan di sana tidak melewati bea cukai lokal atau data impor Tiongkok. Penyimpanan minyak ini memberi Iran waktu untuk mencari pembeli sambil membebaskan armada kapal tankernya (The Iran Primer, 2019).

Menurut data pelacakan kapal tanker Bloomberg, ada kemungkinan lebih banyak minyak dari Teluk Persia menuju tangki penyimpanan terikat Tiongkok. Setidaknya sepuluh kapal pengangkut minyak mentah berukuran sangat besar dan dua kapal kecil yang dimiliki oleh perusahaan minyak Iran milik negara dan perusahaan pelayarannya saat ini berlayar menuju Asia atau berhenti di lepas pantai. Total daya dukung mereka melebihi 20 juta barel (Livemint, 2019).

Selain itu, hubungan ekonomi antara Turki dan Iran menjadi topik utama dalam pertemuan antara pejabat negara Turki dan Iran setelah penghapusan sanksi tersebut. Peran Turki sebagai saluran ekonomi cadangan menjadi lebih penting. Ekspor non-minyak Turki ke Iran hanya mengalami sedikit dampak pada 2018 dan 2019, berbeda dengan penurunan ekspor Iran. Dengan penurunan hubungan ekonomi, Iran akan mengalami kerugian yang lebih besar, tetapi Iran berusaha lebih keras untuk menjaga hubungan agar tidak memburuk, meskipun ini akan sangat menguntungkan Turki. Dengan ini, Turki dapat membantu menyelamatkan ekonomi Iran saat Iran berada di bawah tekanan ekonomi akibat sanksi (Badawi, 2020).

Dibandingkan dengan harga gas yang lebih murah di Azerbaijan dan Rusia, akhirnya Iran menurunkan harga gas yang awalnya relatif mahal. Ekspor gas alam Iran ke Turki terus meningkat, tetapi Iran tidak dapat mendapatkan uang keras darinya akibat sanksi. Untuk menyiasati hal

tersebut, Turki memberikan uang kepada Iran dalam bentuk barang sebagai bagian dari rencana "gas untuk komoditas", kesepakatan gas ini akan berakhir pada tahun 2026 (Badawi, 2020).

Begitu pun hubungan dengan Rusia, ada banyak motivasi bagi Rusia dan Iran untuk meningkatkan perdagangan. Rusia mampu meningkatkan eksportnya dan mendapatkan tempat di Timur Tengah karena hubungannya dengan Iran. Karena sanksi yang dialaminya, para pemimpin Iran sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan Rusia dan ukuran negara tersebut menjadikannya pasar yang signifikan. Menteri Energi Iran Reza Ardakanian mengatakan bahwa kesepakatan dengan Eurasian Economic Union (EAEU) memungkinkan ekspor 70 produk tanpa tarif dan 503 produk lainnya dibebaskan dari bea masuk. EAEU akan mengekspor daging, permen, kosmetik, mesin, dan peralatan teknis ke Iran, sedangkan Iran akan mengekspor sayuran, buah-buahan, bahan bangunan, dan karpet ke EAEU (Islamian, 2019).

Iran juga memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan ekonominya kepada negara di Asia Tengah meskipun dalam keadaan tekanan ekonomi. Iran tidak dapat membantu negara-negara Asia Tengah secara langsung karena ekonominya dihambat oleh sanksi AS, tetapi Iran telah membuat kemajuan besar dalam hubungan ekonominya dengan Tajikistan dan Uzbekistan (Kachmar, 2022).

Iran membangun Terowongan Anzob, sebuah proyek konstruksi bernilai miliaran dolar yang dapat mempersingkat waktu perjalanan antara ibu kota Tajikistan Dushanbe dan kota terbesar kedua Tajikistan Khujand (Kachmar 2022; Putz 2019). Pada tahun 2019 juga, kontraktor Iran membangun pembangkit listrik tenaga air Sangtuda-2 berkapasitas 220 megawatt di Tajikistan, dan Iran juga mulai membangun pembangkit listrik tambahan di Bendungan Rogun (Kachmar, 2022).

Meskipun perekonomian Iran secara keseluruhan melemah, sanksi ekonomi dinilai tidak mencapai tujuan yang diinginkan AS. Keputusan Iran untuk memulai kembali program nuklirnya adalah contoh kegagalannya.

Sejak ratifikasi JCPOA pada 18 Oktober 2015, Teheran telah mematuhi. Namun, Iran melanggar perjanjian dengan melampaui batas persediaan air dan pengayaan uranium pada Mei 2019. Dua bulan kemudian, mereka mengumumkan bahwa mereka akan melampaui batas pengayaan uranium-235 sebesar 3,67% menjadi 4,5% (Drezner, 2022).

Iran kemudian mengklarifikasi bahwa mereka tidak lagi mengikuti pembatasan penelitian dan pengembangan mesin sentrifugal canggih. Pada Januari 2020, Iran mengumumkan bahwa mereka tidak lagi terikat oleh batasan operasional JCPOA. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat bom nuklir Iran turun dari satu tahun sesuai kesepakatan tahun 2015 menjadi hanya beberapa minggu pada tahun 2020 (Drezner, 2022).

Pemerintahan Trump juga percaya bahwa sanksi yang diterapkan dapat mencegah Iran dengan aktivitas revolusionernya di Timur Tengah. Pada kenyataannya, sanksi tersebut tidak membatasi tindakan Iran. Sanksi gagal menghentikan proksi Iran untuk memperkuat pengaruhnya di Afghanistan, Irak, dan Suriah. Serangan teroris yang terjadi pada Saudi Aramco pada tahun 2019 dinilai berasal dari Teheran dan serangan *drone* AS dan kapal tanker minyak di Teluk Persia pada Juni 2019 diduga dilakukan oleh Iran (Drezner, 2022).

Bersama dengan Iran, pemberontak Houthi di Yaman terus meluncurkan rudal ke Arab Saudi. Proksi Iran di Irak melakukan serangan roket dan bom pinggir jalan yang ditujukan terhadap tentara AS. Para analis menyimpulkan bahwa Iran telah membuat persenjataan rudal balistik paling banyak dan paling beragam di wilayah tersebut. Selain itu, setelah Iran mengaktifkan kembali program nuklirnya, sanksi tersebut dianggap tidak berhasil mencapai tujuan yang AS inginkan (Drezner, 2022).

## **KESIMPULAN**

Sanksi ekonomi yang diterapkan oleh AS terhadap Iran pada periode 2018–2020, menyebabkan adanya gangguan pada sektor minyak yang berakibat terganggunya perekonomian di Iran. Iran mengalami kondisi ekonomi yang buruk dengan ditandai adanya penurunan ekspor minyak,



angka FDI, PDB, dan meningkatnya inflasi. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan sebelum Iran dikenakan sanksi dan selama sanksi berlangsung. Perubahan yang terjadi dapat diartikan sebagai dampak dari sanksi yang diterapkan oleh AS pada periode 2018–2020 melalui lima EO yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Adapun Iran merespons sanksi dengan berbagai cara, termasuk diversifikasi ekspor, peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara tertentu (terutama di Asia), dan strategi inovatif seperti diskon pada penjualan minyak. Meskipun begitu, ini tidak menunjukkan bukti bahwa tujuan AS untuk mengubah perilaku Iran atau *coercing* tercapai, melainkan hanya mencapai fungsi sanksi berupa *constraining* dan *signalling*. Hal ini dapat dilihat dari Iran yang melanggar perjanjian dengan melampaui batas persediaan air dan pengayaan uranium serta terus mengembangkan program nuklirnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Allen, S. (2005). "The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure." *International Interactions* 31(2). doi: <https://doi.org/10.1080/03050620590950097>.
- Badawi, T. (2020). "The Economic Turn in Turkish-Iranian Relations." *Carnegie Endowment for International Peace*. Retrieved November 3, 2023 (<https://carnegieendowment.org/sada/81273>).
- Barber, J. (1979). "Economic Sanctions As a Policy Instrument." *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)* 55(3):367–84. doi: 10.2307/2615145.
- Belal, K. (2019). "Uncertainty over the Joint Comprehensive Plan of Action: Iran, the European Union and the United States." *Policy Perspectives* 16(1):23–39. doi: 10.13169/polipers.16.1.0023.
- Booth, K., and Steve S. (1995). *International Relations Theory Today*. Pennsylvania State University Press.
- CEIC Data. (2023). "Iran Crude Oil: Exports, 1980 – 2023." Retrieved October 19, 2023 (<https://www.ceicdata.com/en/indicator/iran/crude-oil-exports>).
- Congressional Research Service. (2023). "U.S. Sanctions on Iran."
- Council on Foreign Relations. (2023). "What Is the Iran Nuclear Deal?" Retrieved October 11, 2023 (<https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal>).

- Creswell, J. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Davenport, K. (2023). "Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran, 1967-2023." January.
- Drezner, D. W. (2011). "Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice." *International Studies Review* 13(1):96–108.
- Drezner, D. W. (2022). "How Not to Sanction." *International Affairs* 98(5):1533–52. doi: 10.1093/ia/iia065.
- Eghtesad Online. (2018). "UNCTAD: \$5 Billion FDI Inflow to Iran in 2017." Retrieved October 19, 2023 (<https://en.eghtesadonline.com/news/782929/UNCTAD-5-Billion-FDI-Inflow-to-Iran-in-2017>).
- European External Action Service. (2015). "Joint Comprehensive Plan of Action."
- Farda, R. (2018). "‘Look East!’ Says Khamenei, Disappointed With Europe’s Efforts To Save JCPOA." *Radio Free Europe / Radio Liberty*. Retrieved November 3, 2023 (<https://en.radiofarda.com/a/look-east-says-khamenei-disappointed-with-europe-s-efforts-to-save-jcpoa/29550531.html>).
- Folkeson, A. (2012). "Part 2: Key Facts on Iranian Oil | The Iran Primer." Retrieved December 19, 2023 (<https://iranprimer.usip.org/blog/2012/jan/11/part-2-key-facts-iranian-oil>).
- Ghasseminejad, S.. (2023). "The Monetary Value of Relaxed Oil Sanctions Enforcement by the Biden Administration." *FDD*. Retrieved October 20, 2023 (<https://www.fdd.org/analysis/2023/09/28/the-monetary-value-of-relaxed-oil-sanctions-enforcement-by-the-biden-administration/>).
- Gilroy, T., and Leferve, C. (2019). "US Government Will Not Reissue Sanctions Waivers for Countries Importing Iranian Oil." *Sanctions & Export Controls Update*. Retrieved October 20, 2023 (<https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/us-government-will-not-reissue-sanctions-waivers-for-countries-importing-iranian-oil/>).
- Giumelli, F., and Ivan, P. (2013). "The Effectiveness of EU Sanctions." *European Policy Centre* (76).
- Glenn, C. (2015). "After Sanctions: Iran Oil & Gas Boom?" *The Iran Primer*. Retrieved October 19, 2023 (<https://iranprimer.usip.org/blog/2015/may/08/after-sanctions-iran-oil-gas-boom>).

- Heydarian, S., Mosayeb P., and Mirjalili, S. H. (2022). "The Impact of Financial Sanctions on Capital Inflow and Outflow (Case of Iran)." *Journal of Money And Economy* 17(1):67–88. doi: 10.52547/jme.17.1.67.
- Idris, F. N., and Mu'tashim, M. R. (2023). "SANKSI UNI EROPA TERHADAP RUSIA ATAS PELANGGARAN TERITORIAL UKRAINA: PENDEKATAN MULTI-TUJUAN." *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 8(01):16–38. doi: 10.36859/jdg.v8i01.1543.
- International Monetary Fund. (2023). "World Economic Outlook (October 2023) - Inflation Rate, Average Consumer Prices." Retrieved October 19, 2023 (<https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO>).
- International Monetary Fund. (n.d.). "IMF Data Mapper ®." Retrieved October 18, 2023 (<https://www.imf.org/external/datamapper/profile>).
- Iran International. (2023). "Iran Claims Currency Reserves Rise Amid Toothless US Sanctions." *Iran International*. Retrieved November 2, 2023 (<https://www.iranintl.com/en/202310178229>).
- Iran Watch. (2019). "Iran Abruptly Raises Fuel Prices, and Protests Erupt." Retrieved November 17, 2023 (<https://www.iranwatch.org/news-brief/iran-abruptly-raises-fuel-prices-protests-erupt>).
- Islamian, K. (2019). "The Russia-Iran Relationship in a Sanctions Era." Retrieved November 3, 2023 (<https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2019/november/the-russia-iran-relationship-in-a-sanction-era/>).
- Jones, S. G., and Newlee, D. (2019). "Iran's Protests and the Threat to Domestic Stability."
- Jungman, C., and Jerry, C. (2022). "Analysis of Iranian Oil Sales Under President Trump vs. President Biden." *UANI*. Retrieved October 20, 2023 (<https://www.unitedagainstnucleariran.com/blog/analysis-of-iranian-oil-sales-under-president-trump-vs-president-biden>).
- Kachmar, O. (2022). "Iran Eyes Opportunities in Central Asia." *New Lines Institute*. Retrieved November 3, 2023 (<https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/power-vacuum/iran-eyes-opportunities-in-central-asia/>).
- Laudati, D., and Pesaran, M. H. (2022). "Identifying the Effects of Sanctions on the Iranian Economy Using Newspaper Coverage." *Journal of Applied Econometrics* 38(3).
- Lipin, M. (2018). "Iran Partially Lifts Currency Controls as US Reimposes Sanctions." *Voice of America*. Retrieved November 2, 2023 (<https://www.voanews.com/a/us-places-sanctions-back-on-iran/4516752.html>).

- Livemint. (2019). "Millions of barrels of Iranian oil piled up at China's ports." *mint*. Retrieved December 21, 2023 (<https://www.livemint.com/news/world/millions-of-barrels-of-iranian-oil-piled-up-at-china-s-ports-1563824324087.html>).
- Macrotrends. (2023a). "Iran Foreign Direct Investment 1970-2023." Retrieved October 19, 2023 (<https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/foreign-direct-investment>).
- Macrotrends. (2023b). "Iran GDP 1960-2023." Retrieved October 18, 2023 (<https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/gdp-gross-domestic-product>).
- Macrotrends. (2023c). "Iran GDP Growth Rate 1961-2023." Retrieved October 19, 2023 (<https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/gdp-growth-rate>).
- Macrotrends. (2023d). "Iran Inflation Rate 1960-2023." Retrieved October 20, 2023 (<https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/inflation-rate-cpi>).
- Mirkin, I. (2018). "FDI and Sanctions: An Empirical Analysis of Short- and Long-Run Effects." *European Journal of Political Economy* 54:198–225. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2018.05.008.
- Morris, K. (2021). "Intro To 2018 U.S. Sanctions On Iran | ACE." Retrieved November 17, 2023 (<https://ace-usa.org/blog/research/research-foreignpolicy/intro-to-2018-u-s-sanctions-on-iran/>).
- Northam, J. (2020). "Why Iran's Economy Has Not Collapsed Amid U.S. Sanctions And 'Maximum Pressure.'" *NPR*, January 16.
- Office of Foreign Assets Control. (2023). "Sanctions List Search." Retrieved November 1, 2023 (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>).
- O'Neill, A. (2023). "Iran - Inflation Rate 2028." *Statista*. Retrieved October 19, 2023 (<https://www.statista.com/statistics/294320/iran-inflation-rate/>).
- Putz, C. (2019). "Tajikistan Tilts Back Toward Iran." Retrieved November 3, 2023 (<https://thediplomat.com/2019/07/tajikistan-tilts-back-toward-iran/>).
- Rasanah International Institute for Iranian Studies. (2023). "FDI in Iran: Prospects and Challenges." Retrieved October 20, 2023 (<https://rasanah-iiis.org/english/monitoring-and-translation/reports/fdi-in-iran-prospects-and-challenges/>).
- Reuters. (2020). "Iranian President Accuses U.S. of Savagery after New Sanctions." *Reuters*, September 26.

- Rome, H. (2022). "Iran's Oil Exports Are Vulnerable to Sanctions | The Washington Institute." Retrieved December 20, 2023 (<https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-oil-exports-are-vulnerable-sanctions>).
- The Iran Primer. (2018). "Former U.S. Officials Challenge Trump Policy." Retrieved November 3, 2023 (<https://iranprimer.usip.org/blog/2018/sep/24/former-us-officials-challenge-trump-policy>).
- The Iran Primer. (2019). "Iran's Increasing Reliance on China." Retrieved November 3, 2023 (<https://iranprimer.usip.org/blog/2019/sep/11/irans-increasing-reliance-china>).
- The Iran Primer. (2021). "What Sanctions Iran Wants Lifted." *The Iran Primer*. Retrieved October 20, 2023 (<https://iranprimer.usip.org/blog/2021/mar/02/sanctions-2-what-iran-wants-lifted>).
- The White House. (2019). "President Donald J. Trump Is Cutting Off Funds the Iranian Regime Uses to Support Its Destructive Activities Around the World – The White House." Retrieved October 20, 2023 (<https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-cutting-off-funds-iranian-regime-uses-support-destructive-activities-around-world/>).
- Ture, H. E., and Khazaei, A. R. (2022). "Determinants of Inflation in Iran and Policies to Curb It." *IMF Working Papers* 2022(181). doi: 10.5089/9798400220555.001.A001.
- UNCTAD. (2021). *World Investment Report 2021*.
- UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023*.
- United Nations. (2018). "Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue | United Nations Security Council." Retrieved October 4, 2023 (<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>).
- US Energy Information Administration. (2021). "Iran's Crude Oil Production Fell to an Almost 40-Year Low in 2020." Retrieved October 19, 2023 (<https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=49116>).
- US Government Accountability Office. (2020). "The Growing Use of Economic Sanctions." Retrieved November 3, 2023 (<https://www.gao.gov/blog/growing-use-economic-sanctions>).
- World Bank. (2019). "Iran's Economic Update — October 2019." *World Bank*. Retrieved October 20, 2023 (<https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/economic-update-october-2019>).

- World Bank. (2023). "World Development Indicators | DataBank." Retrieved October 20, 2023 (<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/FP.CPI.TOTL.ZG>).
- World Bank. (n.d.). "World Bank Open Data: GDP Growth (Annual %) - Iran, Islamic Rep." *World Bank Open Data*. Retrieved October 20, 2023 (<https://data.worldbank.org>).